

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat**

##### **1. Pengertian Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Istilah manajemen merupakan istilah ekuivokal, yakni kata yang memiliki arti banyak, dan sejarah panjang walau secara esensial menurut unsur sama. Keanekaragaman arti manajemen ini, cenderung dikarenakan perbedaan disiplin ilmu, paradigma, perspektif, latar pengalaman dan latar kultural yang berbeda.

Dalam penggunaan modern umumnya, manajemen diartikan sebagai proses di mana suatu kelompok mengarahkan tindakannya untuk mencapai tujuan bersama. Bagi ekonomi, manajemen hanya dipandang sebagai salah satu faktor produksi. Namun, dalam pengertian lebih luas, istilah manajemen dikonsepsikan sebagai suatu proses sosial yang dirancang untuk menjamin terjadinya kerjasama, partisipasi, dan keterlibatan (orang-orang) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif.<sup>1</sup>

Menurut *George R. Terry* yang dikutip oleh Suwandi, Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan – tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber daya lainnya.<sup>2</sup>

Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM) memiliki pengertian yang beragam, namun sesungguhnya memiliki esensi yang sama, yaitu merupakan model pendidikan yang berorientasi pada pengembangan masyarakat (*community*

---

<sup>1</sup>Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),15.

<sup>2</sup>Suwandi, *Manajemen Pendidikan Life Skill (Studi Pondok Pesantren Al Istiqomah Desa Tanjungsari Kebumen)*. Jurnal Kajian Manajemen pendidikan Islam dan studi sosial cakrawala, 2017 (1).

*development*), yang memfokus pada upaya perekayasan sosial. Pendidikan berbasis masyarakat menekankan pada pelibatan siswa/peserta didik (*student engagement*) dalam aktivitas di dalam dan di luar kelas. Ketiganya juga menekankan pada pelibatan masyarakat (*community engagement*) dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi efektivitas belajar dan pemanfaatan *outcome*. Ketiganya memanfaatkan keterlibatan berbagai konsisten masyarakat terkait (*multiple constituents involvement*).

PBM dipandang Hafid Abbas, sebagai pendekatan baru pendidikan yang dapat mengatasi berbagai persoalan pendidikan. Ditegaskan bahwa :

*“Community Based Education is one of innovative approaches to tackles drop-out problems, to increase the transition rate, and to increase enrollment at all levels from primary to higher education levels, types ranging from general to vocational education and all channels of education including formula and out of school education”*<sup>3</sup>

(Pendidikan berbasis masyarakat merupakan salah satu pendekatan inovatif untuk mengatasi masalah drop out untuk meningkatkan tingkat transisi, dan meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan untuk semua jenjang dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, untuk jenis pendidikan umum hingga pendidikan kejuruan melalui jalur pendidikan termasuk pendidikan formal dan luar sekolah). E. Hamilton dan P Cunningham, dalam bukunya *Community Based Adult Education* mendefinisikan PBM sebagaimana dikutip oleh Michael W. Galbraith, merupakan :

*“an educational process by which individuals (in this case adults) become more competent in their skills, attitude, and concepts in an effort to live in and gain*

---

<sup>3</sup>Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 85.

*more control over local aspect of their communities through democratic participation*” ( sebuah proses pendidikan yang dengannya peserta didik menjadi lebih kompeten dalam hal ketrampilan, sikap dan pengetahuan dalam upaya memiliki kemampuan untuk hidup dan memperoleh penguasaan atas kebutuhan masyarakat lokal secara lebih baik melalui partisipasi yang dilakukan secara demokratis ).<sup>4</sup>

Dengan demikian, PBM merupakan suatu proses pendidikan di mana individu, dalam hal ini orang dewasa menjadi lebih kompeten dalam ketrampilan, sikap, dan konsep dalam upaya menghayati, memanfaatkan dan mengontrol atau aspek-aspek lokal dalam masyarakat melalui proses partisipasi yang demokratis. Selain itu, dalam tulisannya, Hamilton dan Cunningham memahami konsep pendidikan berbasis masyarakat sebagai “ *a process would focus on the social relationships that develop as a result of interaction*”, (merupakan proses yang memfokus pada hubungan-hubungan sosial yang berkembang sebagai hasil interaksi).

Selanjutnya, keduanya mengartikan pendidikan berbasis masyarakat sebagai “*the organized activities that develop for the purpose of attaining a specific benefit*” yaitu kegiatan-kegiatan (program) yang terorganisasi yang dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan atau manfaat tertentu.

Pendidikan berbasis masyarakat berada di masyarakat, untuk menjawab kebutuhan belajar masyarakat, dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat pada setiap kegiatan belajar maupun bermasyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat menginsyaratkan adanya dukungan masyarakat dalam pendidikan, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, adanya

---

<sup>4</sup>Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat*. 86.

kemitraan yang sejajar dengan masyarakat, serta adanya kepemilikan penuh masyarakat dalam mengendalikan keputusan program. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan usaha menumbuh kembangkan pendidikan dari bawah, agar pendidikan berakar di masyarakat, dengan inisiatif dari masyarakat, dikelola masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam pengertian beragam tersebut, PBM merupakan istilah teknis operasional yang dipergunakan untuk membedakan dari konsep pendidikan berbasis pemerintah. Pendidikan berbasis masyarakat secara implisit mengandung makna merujuk pada derajat kepemilikan dan partisipasi masyarakat yang mengimplikasikan bahwa pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pendidikan merupakan otoritas sepenuhnya masyarakat.<sup>5</sup>

## **2. Perencanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Dalam penyelenggaraan program atau kegiatan apa pun, perencanaan (*planning*) secara manajerial merupakan hal krusial yang memegang peranan penting bahkan menentukan tingkat efektivitas pelaksanaan program. Perencanaan menjadi “ pijakan ” yang memberikan arah dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian, baik buruknya perencanaan akan berpengaruh terhadap baik-buruknya implementasi programnya. Hal ini karena kejelasan dan ketepatan perencanaan akan berpengaruh terhadap kejelasan implementasinya.<sup>6</sup>

Dalam perencanaan program terdapat beberapa jenis yakni perencanaan atau rencana strategis (RS) merupakan perencanaan jangka panjang (*long-range planning*). RS menggambarkan unsur perencanaan analitik dan komprehensif. RS

---

<sup>5</sup> Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 87.

<sup>6</sup> Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 182

bertujuan memfokus pada visi dan prioritas dalam merespons perubahan lingkungan dan memberi keyakinan dan kepastian bahwa segenap anggota organisasi bekerja berdasarkan persepsi, komitmen, dan tujuan yang sama. Kemudian rencana operasional (RO) yang sering disebut dengan rencana jangka pendek (*short term-planning*), merupakan terjemahan dari rencana strategik dalam bentuk teknis, yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber-sumber dimanfaatkan secara benar (*valid*) sehingga hasilnya dapat di capai secara pasti dengan cara yang sebaik mungkin. Sementara rencana menengah berada di antara rencana strategik dan rencana operasional.

### **3. Pengorganisasian Pendidikan Masyarakat**

Pengorganisasian merupakan proses pengalokasian keseluruhan sumber daya organisasi sesuai rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Dalam pengorganisasian dilakukan aktivitas penyusunan dan pembentukan hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap dilakukan pengaturan dan pembagian tugas-tugas oleh seluruh pengurus atau pengelola lembaga untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian merupakan suatu upaya untuk membagi tugas yang harus dikerjakan, pendelegasian wewenang serta penetapan keterkaitan antarpekerjaan yang efektif. Implikasinya, dalam aktivitas pengorganisasian hendaknya terdapat rumusan tujuan yang hendak dicapai secara jelas.<sup>7</sup>

Langkah-langkah pengorganisasian dalam pendidikan berbasis masyarakat juga sama dengan pengorganisasian bidang lain, yaitu pembagian tugas, penetapan

---

<sup>7</sup> Nurhatatti Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat...*,206

relasi antar bagian organisasi, penetapan struktur organisasi, pendelegasian wewenang, dan pengorganisasian (penataan organisasi).

a) Pembagian tugas

Pembagian tugas berkaitan dengan penentuan alokasi wilayah tugas orang atau jabatan dalam organisasi. Pembagian tugas dapat dilakukan bila sudah ditetapkan lingkup pekerjaan organisasi. Lingkup pekerjaan pendidikan berbasis masyarakat utamanya terkait dengan: kegiatan pendidikan/pembelajaran. Oleh karena itu, pembagian tugas terkait dengan: mengurus peserta didik, mengurus sarana pendukung pelaksana pembelajaran, menata lembaga, dan lain-lain.

b) Penentuan relasi antar bagian organisasi

Setelah melakukan kegiatan penetapan jumlah pekerjaan yang perlu dikelompokkan untuk setiap bagian. Kegiatan selanjutnya penentuan jumlah orang atau kelompok yang diperlukan untuk menempati setiap bagian yang sudah disusun. Langkah selanjutnya dilakukan penentuan relasi antar bagian.<sup>8</sup>

c) Penetapan struktur organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka kerja formal yang mengatur pengelompokan, pengoordinasian, dan pembagian tugas. Dalam suatu struktur tergambar pola interaksi, standar perilaku, sistem komunikasi dan imbalan serta mekanisme sanksi kelompok. Struktur organisasi disusun berdasarkan hasil departementalisasi dengan menggunakan salah satu pendekatan yang dipergunakan dalam departementalisasi.

d) Pendelegasian wewenang

---

<sup>8</sup> Zulfa 'Ainurrosida, Tesis: "*Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Mutu Madrasah*" (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018) 53-55.

Pendelegasian wewenang merupakan usaha untuk memberdayakan orang lain melalui penguasaan individual dengan melakukan pengalihan tugas-tugas organisasi yang membantu pencapaian organisasi. Pendelegasian perlu dilakukan agar pemimpin mampu menyelesaikan pekerjaan lebih banyak.

e) Pengoordinasian

adalah kegiatan menyelaraskan antar bagian agar terjadi keharmonisan bekerja dalam suatu organisasi. Pengoordinasian digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan arah dan membimbing agar anggota organisasi berperilaku sesuai arah yang ditetapkan. Jadi fungsi koordinasi bukan hanya pengawasan (kontrol), melainkan membimbing, mengarahkan. Dengan kata lain, tujuan koordinasi adalah melakukan sinkronisasi dan pengaturan proses pengerjaan agar pelaksanaan pekerjaan menjadi terarah, tepat, selaras, padu sesuai sasaran (tujuan) yang ditetapkan.<sup>9</sup>

#### **4. Pengendalian Pendidikan Masyarakat**

Dalam Pengendalian, juga terdapat tindakan atau kegiatan monitoring dan evaluasi. Evaluasi sebagai fungsi dari administrasi pendidikan merupakan aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai dimana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan ketercapaian program organisasi. Untuk mengukur hasil kesesuaian dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan berbasis masyarakat tersebut, atau untuk melihat bagaimana tingkat efektivitas penyelenggaraan program sejauhmana proses mampu melaksanakan kegiatan atau programnya sesuai dengan tujuan, target yang

---

<sup>9</sup> Zulfa 'Ainurrosida, Tesis: "*Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Mutu Madrasah*" (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018) 58.

ditetapkan serta sejauhmana pelaksanaan mampu menjembatani, mendukung, dan mengakselerasi visi-misi organisasi itu sendiri.<sup>10</sup>

Evaluasi mencakup input, proses dan produk (IPP), penilaian input memfokuskan pada kemampuan sistem dan strategi pencapaian tujuan. Penilaian proses memiliki fokus yaitu pada penyediaan informasi untuk pembuatan keputusan dalam melaksanakan program. Sedangkan penilaian produk berfokus pada mengukur pencapaian proses dan akhir program.

Jika input yang telah menjalani proses kemudian menghasilkan produk yang sesuai dengan visi dan misi yang telah direncanakan maka konsep tersebut tetap dan terus dikembangkan. Namun jika tidak sesuai dengan visi misi yang telah direncanakan maka konsep tersebut harus ditinjau ulang dan proses pembelajaran harus ditingkatkan dengan melihat kualitas sarana dan prasarana baik fisik (kurikulum, gedung, peralatan, bahan kajian, media, metode dan evaluasi) maupun non-fisik (kualitas sumber daya guru).

## **5. Prinsip – Prinsip dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Pendidikan berbasis masyarakat, baik sebagai proses maupun program, merupakan pendekatan penyelenggaraan pendidikan yang menekankan pada pelibatan masyarakat dalam pencapaian tujuannya. Pendidikan berbasis masyarakat dengan demikian, menempatkan peran masyarakat pada kedudukan penting, fungsional bahkan determinatif dalam semua tahapan penyelenggaranya, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pertanggung jawaban hingga pemanfaatan. Terdapat beberapa prinsip dasar yang secara sistematis harus dijadikan acuan, pedoman kaidah dasar dalam penyelenggaraan pendidikan :

---

<sup>10</sup> Nurhatatti Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat...*, 253



- a. Penyelenggara pendidikan harus meyakini bahwa masyarakat dan peserta didik memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam penentuan kebutuhan belajar serta mengidentifikasi sumber-sumber masyarakat yang dapat dipergunakan untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
- b. Peserta didik harus memiliki kemampuan untuk membantu diri mereka sendiri. Dalam rangka ini, kemampuan peserta didik harus dirangsang dan dikembangkan agar mampu secara mandiri memecahkan persoalan yang dihadapi, serta mengembangkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab.<sup>11</sup>
- c. Penyelenggara pendidikan harus melatih para pimpinan atau pengurus lembaga dan pimpinan masyarakat agar memiliki berbagai ketrampilan kepemimpinan, seperti ketrampilan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, disamping ketrampilan membangun dan membina proses kelompok (*group process*) sebagai alat pengembangan upaya peningkatan kualitas diri dan masyarakat yang berkelanjutan.
- d. Penyelenggara harus mengupayakan penyesuaian layanan dan program dengan potensi wilayah masyarakat lokal. Potensi partisipasi masyarakat terwujud secara optimal dan efektif jika layanan, program/aktivitas dan kesempatan keterlibatan masyarakat melekat pada dan berada di masyarakat setempat itu sendiri.
- e. Pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya merupakan pendidikan yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Hal ini berarti bahwa pendidikan dengan segenap proses sistemiknya merupakan representasi gagasan, inisiatif, aspirasi atau cita-cita masyarakat. Gagasan pendiriannya, visi, misi, strategi pembelajaran dan evaluasi maupun penyelenggaraanya

---

<sup>11</sup> Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat...*, 255.

dilakukan oleh masyarakat sebagai representasi dari apa yang dikehendaki masyarakat sesungguhnya. Demikian pula tentang penggunaan lulusan atau produk pendidikannya ditetapkan dan digunakan masyarakat sebagai penggunaannya.<sup>12</sup>

## **B. Mutu Pendidikan**

### **1. Pengertian Mutu Pendidikan**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia “Mutu” berarti Karat. Baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan).<sup>13</sup> Pendidikan adalah perbuatan mendidik. Jadi yang dimaksud dengan mutu pendidikan secara etimologi adalah kualitas perbuatan mendidik. Mendidik disini adalah interaksi antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar di kelas.

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup *input*, proses dan *output* pendidikan. Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (*ouput*) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya. Berbagai *input* dan proses harus selalu mengacu pada mutu-hasil (*output*) yang ingin dicapai.<sup>14</sup>

Menurut Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar, mutu pendidikan adalah kemampuan suatu lembaga pendidikan untuk memanfaatkan sumber-sumber pendidikan sebaik mungkin guna meningkatkan kemampuan dalam belajar.

---

<sup>12</sup> Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat...*,258.

<sup>13</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 788.

<sup>14</sup> Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 85.

Disini makna mutu pendidikan tidak hanya berbicara soal hasil, tetapi juga proses dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan dikatakan bermutu apabila proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan lancar. Begitu juga dengan hasil yang didapat memuaskan. Proses belajar mengajar dapat berjalan lancar bila guru dan murid bisa berkomunikasi dengan baik, lingkungan belajar yang nyaman, serta didukung sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses belajar mengajar ini.

Mutu pendidikan bisa dilihat dari hasil, mengacu pada prestasi yang diperoleh murid maupun sekolah untuk kurun waktu tertentu. Namun selain itu, kemampuan sekolah untuk menghasilkan lulusan-lulusan terbaik juga menunjukkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Adapun kriteria pendidikan bermutu dilihat dari sudut pandang Negara Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Sekolah yang mampu mendidik muridnya berbudi pekerti luhur, bermoral, bertaqwa, dan berwawasan nasional kebangsaan.
- b. Sekolah yang mampu menanamkan ketrampilan dasar untuk mencapai prestasi akademik berdasarkan kurikulum nasional serta mengembangkan bakat dan minat individu melalui prestasi non akademik.
- c. Sekolah yang mampu menanamkan wawasan lingkungan dan sistem nilai yang merefleksi sosial, budaya, religius, yang bermutu konsep diri atau percaya diri.
- d. Sekolah yang mampu menjalin hubungan harmonis antara kepala sekolah dengan adminitratif dan akademik.
- e. Sekolah yang mampu menciptakan suasana bersemangat dan penuh motivasi pada semua komunitas sekolah.
- f. Sekolah yang mampu mengembangkan kreatifitas guru dalam mengajar secara berkelanjutan melalui evaluasi, perubahan, dan perbaikan pengajaran.

- g. Sekolah yang mampu membangkitkan semangat murid untuk berpartisipasi mengembangkan potensi akademik maupun non akademik.

## **2. Karakteristik Sekolah Yang Bermutu**

Untuk menetapkan kriteria pendidikan yang bermutu terdapat beberapa pendekatan yang digunakan. Menurut *Hoy Forgusen* ada dua, namun menurut *Robbi* ada tiga pendekatan, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Pendekatan pencapaian tujuan, Maksudnya bahwa dalam menentukan kriteria pendidikan, difokuskan pada tujuan yang akan dicapai.
- b. Pendekatan proses, Keefektifan sekolah tidak hanya dilihat dari tingkatan pencapaian tujuan tetapi difokuskan pada proses dan kondisinya yang disebut karakteristik sekolah, yang berupa karakteristik internal dan karakteristik eksternal.
- c. Pendekatan respon lingkungan, menurut pendekatan ini sekolah dikatakan sukses jika tujuannya dinyatakan secara eksplisit, ditampakkan secara rasional dan bijaksana, diberi kesan teratur dan terkontrol, mempunyai struktur dan prosedur yang pantas, memberi pertanggung jawaban dan penampilan tindakan yang meyakinkan.

## **3. Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Mutu Pendidikan**

Peningkatan mutu pada setiap satuan pendidikan diarahkan dalam bentuk upaya terselenggaranya layanan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan. Menurut *Umaedi*, peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.<sup>16</sup> Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka

---

<sup>15</sup> Mubashyiroh, *Implementasi Manajemen Pembelajaran dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Madrasah Unggulan di MTs Negeri Lamongan*, Skripsi UIN Malang, (2007), 44-46.

<sup>16</sup> Umaedi, *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikdasmen Direktur Pendidikan Menengah Umum, 2000)

pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas, diantaranya dengan pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi tenaga pendidikan dan kependidikan.

Mutu produk pendidikan akan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut :

- a. Tenaga kependidikan
- b. Peserta didik
- c. Proses pembelajaran
- d. Sarana pendidikan
- e. Keuangan
- f. Hubungan dengan masyarakat<sup>17</sup>

### **C. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Oleh karena itu, PAUD memberi kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kepribadian dan potensi secara maksimal. Atas dasar ini, lembaga PAUD perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan seperti kognitif, bahasa, sosial, emosi, fisik dan motorik.

Secara institusional, Pendidikan Anak Usia Dini juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan, baik koordinasi motorik (halus dan

---

<sup>17</sup> Suryadi Prawirosentono, *Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu Terpadu*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 12.

kasar), kecerdasan emosi, kecerdasan jamak (*multiple intelligences*), maupun kecerdasan spiritual. Sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan Anak Usia Dini. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini disesuaikan dengan tahap – tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini itu sendiri.<sup>18</sup>

Secara yuridis, istilah anak usia dini di Indonesia ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 14 dinyatakan bahwa “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. Selanjutnya, pada pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini dinyatakan bahwa “1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar; 2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, atau informal; 3) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal : TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat; 4) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal : KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat; 5) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal : pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan;”

#### **D. Pengembangan, Inovasi dan Struktur Kurikulum PAUD**

Kegiatan pembelajaran PAUD, walaupun dilakukan melalui kegiatan bermain, tetap membutuhkan perencanaan yang matang sebagai acuan pelaksanaan kegiatan agar tujuan lebih terarah. Rencana kegiatan ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan anak sesuai tahap perkembangan dan usia anak. Tahap perkembangan yang

---

<sup>18</sup> Suyadi, *Teori Pembelajaran Anak Usia Dini*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) 22-23.

sesuai usia anak dapat diambil dari berbagai indikator yang ada dalam kurikulum (Maryatun,2010).

Terkait dengan kurikulum anak usia dini, *Catron & Allen* berpendapat bahwa tujuan pengembangan kurikulum yang utama adalah untuk mengoptimalkan perkembangan anak secara menyeluruh serta terjadinya komunikasi interaktif. Kurikulum pada anak usia dini haruslah memfokuskan pada perkembangan yang optimal pada seorang anak melalui lingkungan sekitarnya yang dapat menggali berbagai potensi tersebut melalui permainan serta hubungan dengan orang tua atau orang dewasa lainnya. Menurut Yuliani Sujiono (2009) tujuan pengembangan kurikulum bagi anak usia dini adalah untuk mengoptimalkan perkembangan anak secara menyeluruh berdasarkan berbagai dimensi perkembangan anak usia dini baik perkembangan sikap pengetahuan, ketrampilan dan kreativitas yang diperlukan oleh anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa selanjutnya.

Sama halnya dengan prinsip pengembangan kurikulum secara umum, Asef Umar Fakhruddin (2010) menjelaskan bahwa prinsip – prinsip pengembangan kurikulum anak usia dini adalah sebagai berikut<sup>19</sup> :

1. Bersifat Komprehensif

Kurikulum harus menyediakan pengalaman belajar yang meningkatkan perkembangan anak secara menyeluruh dalam berbagai aspek perkembangan. Ketika kurikulum tidak bersifat komprehensif maka proses pembelajaran terancam tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Proses pembelajaran menjadi tanpa arah dan tujuan.

2. Secara Bertahap

---

<sup>19</sup> Novi Mulyani, *Dasar – Dasar Pendidikan Usia Dini*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2016), 72-73

Kurikulum harus menyediakan berbagai kegiatan dan interaksi yang tepat didasarkan pada usia dan tahapan perkembangan setiap anak dan juga dengan memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki anak.

### 3. Melibatkan Orang Tua

Keterlibatan orang tua sebagai pendidik pertama bagi anak sangatlah penting, dan akan membawa pengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, peran orang tua dalam pendidikan anak usia dini sangatlah penting dalam pelaksanaan pendidikan.

### 4. Melayani Kebutuhan Individu Anak

Kurikulum dapat mawadahi kemampuan, kebutuhan, dan minat setiap anak serta memperhatikan aspek – aspek terdalam atau potensi – potensi anak. Kurikulum yang baik adalah apabila kurikulum tersebut mampu menjadi penopang kreatifitas anak.

### 5. Merefleksikan Kebutuhan dan Nilai Masyarakat

Kurikulum harus memperhatikan kebutuhan setiap anak sebagai anggota keluarga dan nilai – nilai budaya suatu masyarakat. Agar anak dapat beradaptasi dan berkontribusi terhadap masyarakat.

### 6. Mengembangkan standar kompetensi anak

Kurikulum yang dikembangkan harus dapat mengembangkan potensi anak. Standar kompetensi sebagai acuan dalam menyiapkan lingkungan belajar anak. Apabila kurikulum yang ada belum bisa mengembangkan standar kompetensi anak, maka kurikulum tersebut perlu direformasi.

### 7. Mewadahi Layanan Anak Berkebutuhan Khusus



Kurikulum yang dikembangkan hendaknya memperhatikan semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Anak – anak dengan kecacatan tertentu tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif

#### 8. Menjalinkan Kemitraan dengan Keluarga di Masyarakat

Kurikulum hendaknya dapat menunjukkan cara membangun sinergi dengan keluarga dan masyarakat sehingga tujuan pendidikan tercapai. Kurikulum harus pula menjadi strategi mendekatkan anak atau pihak instansi pendidikan dengan masyarakat dimana instansi tersebut berada.

#### 9. Memperlihatkan Kesehatan dan Keselamatan Anak

Kurikulum yang dibangun hendaknya memperhatikan aspek kesehatan dan keamanan anak saat anak ada di sekolah. Kurikulum harus menjadi strategi dalam melindungi anak dari hal – hal yang menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.

#### 10. Menjabarkan Prosedur Pengelolaan Lembaga

Kurikulum hendaknya dapat menjabarkan dengan jelas prosedur manajemen atau pengelolaan lembaga kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas.<sup>20</sup>

#### 11. Manajemen Sumber Daya Manusia

Kurikulum hendaknya dapat menggambarkan proses manajemen pembinaan sumber daya manusia yang terlibat di lembaga. Sumber daya manusia mejadi bagian integral dalam proses pendidikan.

#### 12. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Kurikulum dapat menggambarkan penyediaan sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga. Sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga. Sarana dan prasarana

---

<sup>20</sup> Novi Mulyani, *Dasar – Dasar Pendidikan Usia Dini*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2016), 74-75

memiliki tingkat urgensi yang tidak kalah dengan bagian – bagian yang lain karena sarana dan prasarana menjadi penunjang proses pendidikan.

Mengenai struktur kurikulum PAUD, peraturan pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013 Pasal 77G (1) menjelaskan bahwa struktur kurikulum pendidikan anak usia dini (PAUD) berisi program – program pengembangan nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.<sup>21</sup>

1. Pengembangan nilai agama dan moral mencakup perwujudan suasana belajar untuk tumbuh-kembangnya perilaku baik yang bersumber dari nilai agama dan moralitas dalam konteks bermain.
2. Pengembangan motorik mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh-kembangnya kematangan kinestetik dalam konteks bermain.
3. Pengembangan kognitif mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh-kembangnya kematangan proses berfikir dalam konteks bermain.
4. Pengembangan bahasa mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh-kembangnya kematangan bahasa dalam konteks bermain.
5. Pengembangan sosial-emosional mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh-kembangnya sikap dan ketrampilan sosial dalam konteks bermain.
6. Pengembangan seni mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh-kembangnya apresiasi seni dalam konteks bermain.

Bidang pengembangan tersebut dikembangkan dalam program pembelajaran di PAUD. Program pembelajaran terdiri dari :<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Novi Mulyani, *Dasar – Dasar Pendidikan Usia Dini*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2016), 75-76

<sup>22</sup> Novi Mulyani, *Dasar – Dasar Pendidikan Usia Dini*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2016), 76-77

- a) Rencana kegiatan tahunan, yaitu program yang yang dibuat dan direncanakan dalam kurun waktu satu tahun pelajaran.
- b) Rencana semester, yaitu program pembelajaran yang berisi jaringan tema, lingkup pengembangan dan tingkat pencapaian perkembangan yang ditata urut dan sistematis.
- c) Rencana mingguan, yaitu penjabaran dari program semester yang berisi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tingkat pencapaian perkembangan anak dalam satu minggu sesuai dengan pembahasan tema dan sub tema.
- d) Rencana kegiatan harian, yaitu penjabaran dari rencana kegiatan mingguan yang memuat kegiatan pembelajaran baik dilaksanakan secara individual, kelompok maupun klasikal dalam satu hari untuk mencapai tingkat pencapaian perkembangan anak (Direktorat Pembinaan PAUD Kemendikbud, 2013).